JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 816-822
DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3118
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

Kesejahteraan Pendamping Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Pendamping PKH di Jakarta Timur)

Dian Larasati*, Fentiny Nugroho
Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia
*Correspondence email: larasatidian77@gmail.com

Abstrak. Kemiskinan tetap menjadi isu sentral global di semua negara di dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan pendamping sosial PKH yang diperoleh selama ini meliputi kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif. Kesejahteraan subyektif mencakup perasaan sejahtera, kepuasan, yang dirasakan seseorang saat bekerja sebagai pendamping sosial. Sedangkan, kesejahteraan obyektif meliputi aspek pendapat yang dirasa cukup untuk emmenuhi kebutuhan hidup para pendamping sehari-harinya, kemudian aspek penegluaran yang dirasa lebih rendah dari pendapatan, tempat tingga yang tersedia walaupun hanya ngontak atau menyewa, ketersediaan layanan kesehatan walaupu para pendamping harus membayar biaya sendiri, transportasi lancar walau memang tidak ada biaya tambahan untuk transportasi. Disisi lain, faktor pendukung kesejahteraan pendamping umur, sikap religiulitas, dukungan sosial dari masyarakat dan perangkat desa, kepribadian pendamping, tempat tinggal yang layak dan keadaan sosial keluarga pendamping yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tentang gaji pendamping yang masih dibawah UMP Jakarta.

Kata Kunci: Kesejahteraan; Pendamping; Sosial; PKH

Abstract. *Poverty remains a global central issue in all countries in the world. The purpose of this research is to describe and analyze the welfare of PKH social workers in East Jakarta and the factors that support and hinder the welfare of PKH social workers in East Jakarta. This study uses a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the welfare of PKH social assistants obtained so far includes subjective welfare and objective welfare. Subjective well-being includes feelings of well-being, satisfaction, that a person feels when working as a social companion. Meanwhile, objective welfare includes aspects of opinion that are felt to be sufficient to meet the daily needs of the companions, then expenditure aspects that are felt to be lower than income, housing that is available even if only by contact or renting, availability of health services even though the companions have to pay their own expenses. , transportation is smooth even though there are no additional costs for transportation. On the other hand, factors supporting the welfare of the companion of age, religious attitudes, social support from the community and village officials, personality of the companion, proper housing and good social conditions of the accompanying family. Meanwhile, the inhibiting factor is the companion's salary, which is still below the Jakarta's UMP.*

Keywords*: Welfare; Asistant; Social; PKH*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di dunia. Semua negara setuju bahwa kemiskinan adalah masalah yang menghambat kesejahteraan rakyat. Dengan keadaan kaya akan sumber daya alam dan padat penduduk, Indonesia perlu mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya keuangan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kesempatan kerja., kemalasan individu bekerja dan beban kehidupan keluarga yang berat sehingga mengakibatkan sumber pendapatan masih tergolong minim. (Suharto, 2009). Sumber pendapatan utama merupakan salah satu indikator terpenuhinya tingkat kesejahteraan. Bahkan, kesejahteraan dipandang sebagai kepuasan individu dengan apa yang telah dicapai. Karena Indonesia termasuk negara berkembang, tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih lebih rendah dibandingkan negara maju di dunia.

Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2020), angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,78%, dan jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta, dengan kenaikan awal

sebesar 0,56%, atau bisa dikatakan meningkat 1,63 juta pada September (2019) dan 0,37% atau 1,28 juta pada Maret (2019). Jika dibandingkan, sekitar satu dari sembilan orang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga untuk mencapai tujuan nasional negara, pemerintah harus mengatasi masalah tersebut. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dari negara Indonesia yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial termasuk ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban duni. Berdasarkan dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan berusaha memperbaiki keadaan dengan merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat, salah satunya membuat program nasional (Fahrudin, 2012).

Program Nasional ini dibawah naungan oleh Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Salah satu program utamanya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dasar masyarakat miskin dan telah didirikan sejak 2007 di Indonesia. merupakan pemberian bantuan bersayarat atau *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang fberfokus untuk perawatan sosial yang komprehensif untuk orang miskin dan rentan, dengan komponen kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perawatan sosial (lansia dan orang dengan kebutuhan khusus (Habibullah et al., 2017)). Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial agar dapat membantu penerima manfaat untuk mengubah perilaku mandiri dalam keluarganya. Oleh karena hal tersebut, semua personel pendamping PKH dipilih seseorang yang berkompeten dan memiliki keterampilan terukur untuk melakukan tugas dan fungsi utama yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau menjadi personel di garis depan keberhasilan pada program. Proses pendampingan yang dilakukan SDM PKH akan membantu tercapainya tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. (Gulo, 2018).

Pelaksanaan di lapangan memiliki beberapa kendala, antara lain kemampuan pendamping dalam menggunakan bahasa daerah dan budaya sekitar yang harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penerima bantuan adalah masyarakat asli dan banyak kategori penerima bantuan adalah masyarakat lansia, sehingga pendamping membutuhkan dukungan dari masyarakat atau penerima manfaat lainnya yang fasih menggunakan bahasa daerah. Pendamping juga harus memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kendala tersebut yang menjadikan ketidakseimbangan antara tugas dan tanggung jawab dengan kompetensi yang diterima oleh pendamping. Remunerasi yang diterima oleh para pendamping kurang dari rata-rata upah minimum regional (UMR) hal ini tentunya juga menyulitkan pendamping yang tinggal di wilayah metropolitan karena bahan-bahan lebih mahal daripada daerah lainnya. Akibatnya, banyak pendamping yang melakukan pencarian terhadap pekerjaan lain atau pekerjaan sampingan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bahkan, minimnya kesejahteraan kawan-kawan pendamping berujung pada maraknya kejahatan yang membahayakan, seperti yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan dimana salah satu oknum pendamping melakukan tindak kejahatan dengan melakukan pungutan liar dan memegang ATM milik penerima bantuan dan alhasil dana yang seharunya telah tersedia untuk penerima bantuan diambil oleh oknum tersebut. Selain kejadian itu, terungkap pula seorang oknum di Malang, Jawa Timur, menggelapkan uang bansos PKH dengan motif yang sama yakni menyimpan kartu ATM penerima dan tidak menyerahkannya kepada penerima. Dan kasus tersebut akhirnya diserahkan kepada pihak yang berwajib karena sudah termasuk tindakan pidana.

Berdasarkan kasus diatas, citra pendamping sosial sudah ternodai, Namun dalam hal ini pun tentunya tidak semua pendamping melakukan tindakan pidana tersebut, dan masih banyak pendamping yang baik yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, sehingga perlu dukungan dengan baik oleh pemerintah dan pembuatan program ini. Pendamping PKH pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan kepada pemerintah daerah maupun pusat (Kemensos, 2021). Untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik, pendamping sangat perlu memiliki keterampilan dan teknik. Pendamping juga harus dididik melalui pengikutsertaan pendamping terhadap pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas

setempat maupun pusat (Rahmawati & Kisworo, 2017). Agar program ini berjalan dengan baik, pendamping harus menunjukkan prestasi kerja yang baik, sehingga pendamping harus membuktikan bahwa mereka adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan program keluarga harapan yang efektif dan efisien (Arnika, 2018). Selain itu, pendamping harus berperan aktif ketika dilapangan karena mereka memiliki kontak langsung dengan penerima manfaat, baik dalam memberikan bantuan, advokasi, pendidikan, atau pekerjaan pendataan administrasi. Di sisi lain, ketika melakukan kerja lapangan yang baik dalam mengumpulkan data KPM, pendamping harus menyusuri berbagai wilayah dengan medan jalan yang bermacam-macam (Susantyo et al., 2018).

Khusus di wilayah perkotaan Jakarta Timur, aksesnya atau medan jalannya telah bagus, jalan terpelihara, dan pemukiman KPM dekat, namun, permasalahan yang terjadi adalah kemudahan akses tidak didukung dengan tingkat pendampingan yang seimbang sehingga menyulitkan para pendamping untuk melakukan prosedur administrasi. Selain itu, persil PKH hanya menerima gaji dari APBN yang tidak diseimbangkan dengan Upah Minimum Daerah (UMP) sehingga banyak pendamping yang melakukan kegiatan *double-job* untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari (Kemensos, 2021) Berbeda dengan provinsi lain, Sumber Daya Manusia (SDM) di PKH lebih banyak diminati oleh pemerintah daerah dan selain digaji dalam APBN, APBD Kabupaten Bogor akan dibiayai dengan dana tambahan atau disebut dana bersama yang mengelola SDM PKH untuk daerah. meskipun jumlahnya tidak besar, hal ini tentunya sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk pendamping. Namun memang, karena letaknya dipedesaan, jarak dari satu desa ke desa lain juga jauh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kondisi kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif adalah tempat untuk mencari dan memahami makna individu atau kelompok orang tertentu sebagai masalah sosial atau manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena objek penelitian (Sugiyono, 2019). Lokasi subjek penelitian adalah Sekretariat PPKH di Jakarta Timur, dan 12 informan diperoleh dengan metode pemilihan informan secara purposive sampling. Data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab tugas penelitian dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, antara lain data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, wawancara rinci, dan catatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Neuman (2016) melaporkan bahwa dalam kerja lapangan, peneliti mengumpulkan banyak data kualitatif yang merinci orang, perilaku, dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Data yang terkumpul dianalisis, diorganisasikan, dibakukan dan dipelajari. Sementara itu, peneliti mencari pola dan hubungan pada data yang dihasilkan.

HASIL

Keluarga Harapan sudah ada di Jakarta Timur sejak tahun 2010. SDM PKH di Jakarta Timur memiliki 62 asisten dengan 25 perempuan dan 37 laki-laki dari angkatan 2007 hingga 2021. D3/S1 mendominasi Kualifikasi Pendidikan SDM di Jakarta Timur. Lulusan dari berbagai jurusan/jurusan. Total kpm help hanya di area ini bervariasi dari rata-rata 300-500kpm help per Kerlahan. Pada tahun 2021, sekitar 28.665 penerima manfaat. Apalagi terkait dengan kegiatan yang dilakukan para asisten saat melakukan rapat kolaboratif dengan seluruh pegawai SDM PKH yang berlangsung di kantor-kantor masing-masing dinas. Di sisi lain, dalam kegiatan rutin memberikan bantuan, pendamping berada di lingkungan sekitar untuk membantu masyarakat baik dalam kegiatan administratif maupun bersyarat. Wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa sebagian besar informan menjawab ada kalanya merasa puas dan ada kalanya tidak puas dalam bekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja sosial PKH juga puas dengan kesejahteraan subjektif. Secara spesifik dijelaskan bahwa semakin total pengalaman positif dan peristiwa menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan individu, semakin bahagia dan puas individu tersebut.

Berdasarkan aspek-aspek kesejahteraan pendamping dengan kriteria berikut ini : (a) pendapatan yang diperoleh pendamping yang bersumber dari penghasilan atau gaji tiap bulan adalah 3.000.000 perbulan yang masuk dalam kategori rendah. Gaji yang diterima pendamping hanya gaji pokok saja tidak ada tambahan transportasi, pembelian alat, uang makan dan lain-lainnya. Namun, para pendamping merasa cukup dengan jumlah pendapatan tersebut; (b) Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp1.000.000-Rp.2.000.000 masuk dalam kriteria sedang. Dengan jumlah pengeluaran tersebut, pendamping masih cukup untuk makan 2-3x sehari dengan lauk yang sederhana, oleh karena hal tersebut beberapa pendamping mencari kegiatan lain yang bisa menambah pendapatan mereka guna memenuhi kebutuhan hidupnya; (c) Tempat tinggal yang mereka tempati masuk dalam kategori permanen namun rata-rata mereka sewa atau tinggal masih dengan orangtua namun ada juga mendapatkan kepemilikan rumah dari keluarga; (d) akses terhadap layanan kesehatan dengan kriteria cukup, karena tempat tinggal dekat dengan fasilitas kesehatan namun untuk fasilitas ini mereka tidak mendapatkan ganti/klam dari tempat bekerja sehingga mereka biaya sendiri atau mengikuti BPJS secara mandiri; dan (e) akses fasilitas transportasi dengan kriteria mudah karena banyak transportasi untuk menjangkau ke tempat kerja atau ketempat lainya. Namun, Uang transportasi yang digunakan saat kegiatan pendampingan berasal dari pribadi karena para pendamping tidak mendapatkan uang tambahan diluar dari gaji.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pendamping sosial Program Keluarga Harapan tetap merasa sejahtera dimana kesejahteraan tersebut berkaitan dengan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subyektif meliputi rasa bahagia dan puas dalam bekerja sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial secara konkret menunjukkan bahwa jika seseorang memiliki tambahan pengalaman positif yang terjadi pada kehidupan seseorang, maka semakin banyak peristiwa menyenangkan yang dialaminya, sehingga akan semakin bahagia dan puas. Kesejahteraan obyektif juga diperoleh pekerja sosial PKH, dimana bisa menggunakan aspek pendapatan yang dianggap cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari, aspek pengeluaran konsumsi yang hanya bisa digunakan saat ada pertemuan, ketidaktersediaan tempat tinggal dan tidak ada aspek layanan kesehatan secara privat atau khusus untuk menjamin kesehatan para pendamping. Selain itu, aspek akses transportasi, para pendamping harus membayar transportasi secara mandiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syifa et al (2018) dimana menjelaskan bahwa nilai kepuasan subyektif dari pelaku Wirausaha di Domino Store tergolong tinggi). Hal ini dikarenakan para pelaku merasa mencintai hidupnya dan menganggap semuanya baik-baik saja. Hidup mereka tentu tidak sempurna, tetapi mereka merasa sebagian besar hidup mereka berjalan dengan baik karena motivasi yang ada pada diri mereka. Menurut pendapat Ryff (1995) ada enam indikator yang membentuk kebahagiaan (*well being*) yakni penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, pengelolaan lingkungan, tujuan hidup, dan *self development*. Menurut hasil wawancara, pendamping merasakan bahagia atau puas, ada pula yang merasa cemas. Selain itu, para pendamping juga merasa senang ketika memiliki banyak kawan saat bertemu dengan ibu-ibu KPM, mereka memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan mampu mengendalikan lingkungannya. Disisi lain, para pendamping juga merasa senang karena pekerjaan yang dijalani merupakan pekerjaan yang mulia, hal tersebutlah yang membuat pendamping termotivasi dan terus melanjutkan hidupnya sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Hal ini juga termasuk kesejahteraan subyektif individu.

Kesejahteraan yang bersifat subjektif adalah pertanyaan tentang kepuasan hidup melalui kualitas hidup, dan kesejahteraan objektif harus menjadi Masalah sosial yang dapat diverifikasi, termasuk kebutuhan manusia, kebutuhan ekonomi, kebutuhan lingkungan, dan sebagainya. Perspektif (Summers et al., 2012), mengkonseptualisasikan kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ekonomi sama dengan kebutuhan kesejahteraan, dan pekerjaan memenuhi kebutuhan ekonomi dasar seperti biaya hidup, biaya pendidikan, pendapatan, kekayaan pribadi, dan infrastruktur. Jika seorang individu secara objektif memiliki enam peran, dapat dikatakan bahwa orang itu kaya, tetapi dalam praktiknya hal ini tidak dapat dibedakan dari pendapat yang dikemukakan oleh Summers et al (Mulyadi 2018).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kalangan masyarakat miskin berpengaruh

positif karena dapat meringankan beban tanggungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti terbantunya Keluarga Penerima Manfaat akan biaya sekolah, pemenuhan gii pada bayi atau balita yang bisa mendapatkan posyandu dan lain sebagainya. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan ini juga salah satu program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Habibullah et al (2017) dan Rahmawati dan Kisworo (2017), pendamping Program Keluarga Harapan berada dalam posisi mitra pemerintah dan mitra masyarakat, maka pendamping sosial tersebut harus mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang berasal dari pemerintah. Peran pendamping PKH didasarkan pada konsep peran pekerja sosia yaitu sebagai peran dan keterampilan fasiliatif. Pekerjaan ini berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan dukungan di masyarakat. Tugas-tugas yang terkait dengan peran ini meliputi pemodelan, negosiasi, pemberian bantuan, pembuatan perjanjian kerja, dan bertindak sebagai koordinator dan implementasi sumber daya. Di sisi lain, pendamping juga bertanggung jawab untuk memberikan keterampilan mendidik masyarakat. Sebagai agen yang harus memberikan informasi dan bimbingan praktis kepada para penerima bantuan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Adapun maksud dan tujuan Program Keluarga Harapan dapat dicapai melalui upaya para pendamping sosial Program Keluarga Harapan dan Koordinator Kota untuk mencapai tujuan dari program itu sendiri. Pendamping sosial merupakan aktor utama dalam program keluarga harapan ini, sehingga sangat penting bagi setiap pemerintah daerah/pusat untuk memperhatikan situasi pendamping sosial saat ini. Dalam hal ini kesejahteraan pendamping sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi operasional dan pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan itu sendiri.

Dalam proses menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendamping Program Keluarga Harapan di Jakarta Timur, ada beberapa faktor yang menghambat dan mendukung kesejahteraan para pendamping tersebut. Faktor pendukung tersebut antara lain umur, sikap religiulitas, dukungan sosial, kepribadian pendamping, tempat tinggal dan keadaan sosial keluarga pendamping. Sejatinya, kesejahteraan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) di Jakarta Timur termasuk dalam kategori tiga atau tingkat III, dengan hasil bahwa keluarga berupaya untuk meningkatkan ilmu agamanya dengan mengikuti kajian-kajian, sholat berjamaah dengan masyarakat atau kegiatan keagamaan lain menurut agama masing-masing. Pendamping juga menabung sebagian pendapatannya berupa uang dan barang. Upaya tersebut muncul dan memotivasi para pendamping karena pendamping mempelajari modul yang berkaitan dengan ekonomi yang diberikan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Minimal satu minggu sekali para pendamping memiliki kebiasaan makan bersama keluarga, hal tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan dengan anggota keluarga walaupun hanya membeli makanan yang sederhana sehingga komunikasi sesama anggota keluarga terjalin lancar. Disisi lain juga aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar serta mendapatkan informasi bberasal dari majalah/radio/televisi atau sumber lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi utnuk mendapatkan informasi ini berarti para pendamping sudah meng-upgrade diri untuk belajar hal-hal yang baru terkait keberagaman teknologi saat ini yang semakin canggih.

Sedangkan untuk faktor penghambat ialah adanya bencana alam seperti longsor, gempa bumi dan lainnya yang menyebabkan akses ke wilayah tujuan terputus. Disisi lain, jenis kelamin, tingkat stress dan budaya individualistic juga menjadi faktor penghambat kesejahteraan para pendamping sosial PKH. Faktor penghambat juga bisa berasal dari pemerintah, dimana pereintah tidak segera menaikkan gaji yang diterima oleh pendamping. Gaji para pendamping masih 3.000.000 sedangkan UMP Jakarta sudah mencapai angka 4.641.854, hal ini dapat disimpulkan bahwa gaji yang diterima masih dibawah UMP Jakarta. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dita (2012) dimana faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan terdiri dari faktor gaji/penghasilan, jaminan atau layanan kesehatann, pendidikan/pelatihan, bonus, lembur, insentif, beras dan bahan bakar. Berbeda dengan pekerja tidak tetap (pekerja eksternal atau biasa disebut pekerja harian, dll) yang tidak menerima bonus, tunjangan lembur, insentif, makan, kesehatan, dan pendidikan di perusahaan pabrik. Menurut Ryff (1995) juga mengemukakan pendapat serupa bahwa faktor yang mempengaruhi Psychological Well Being adalah umur, jenis kelamin, budaya, keagamaan,

dukungan sosial, kepribadian dan tingkat stress. Sehingga dapat disimpulkan hal-hal tersebut memang benar bisa mempengaruhi kesejahteraan pendamping, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat kesejahteraan.

SIMPULAN

Kesejahteraan pekerja sosial PKH sampai saat ini meliputi kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif. Kebahagiaan subjektif mencakup perasaan sejahtera dan kepuasan dari melayani sebagai pendamping sosial. Sedangkan, kesejahteraan obyektif meliputi aspek pendapat yang dirasa cukup untuk emmenuhi kebutuhan hidup para pendamping sehari-harinya, kemudian aspek penegluaran yang dirasa lebih rendah dari pendapatan, tempat tingga yang tersedia walaupun hanya ngontak atau menyewa, ketersediaan layanan kesehatan walaupu para pendamping harus membayar biaya sendiri, transportasi lancar walau memang tidak ada biaya tambahan untuk transportasi. Disisi lain, faktor pendukung kesejahteraan pendamping umur, sikap religiulitas, dukungan sosial dari masyarakat dan perangkat desa, kepribadian pendamping, tempat tinggal yang layak dan keadaan sosial keluarga pendamping yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tentang gaji pendamping yang masih dibawah UMP Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Arnika, Mita. 2018. *Analisis kompetensi pendamping program keluarga harapan dalam meningkatkan kinerja kota makassar (studi kasus pendamping di kecamatan tallo).* Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makasar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4340-Full_Text.pdf. Diakses 10 April 2022.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Profil kemiskinan di indonesia september 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Creswell, John W. 2010. *Research Design; Pendekatan metode kualitatif, kuantitaif dan campurna*. Edisi 4. Pustaka Belajar : Yogyakarta.

Gulo, N. J. 2018. Analisis kinerja pendamping program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota medan. *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara. Medan.

Habibullah, et, al. 2017. *Pemanfaatan bantuan sosial program keluarga harapan.* Jakarta: BBP3KS. Kementerian Sosial RI.

Hanjani, Dita Antania. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan outsourcing PT. Perkebunan nusantara II Unit kebun sawit seberang. *Jurnal: Universitas Sumatera Utara*. https://123dok.com/document/eqo5d47y-mempengaruhi-tingkat-kesejahteraan-karyawan-outsourcing-perkebunan-nusantara-seberang.html

Kementerian Sosial. 2020. *Rencana strategis kementerian sosial 2020-2024*. https://kemsos.go.id/uploads/topics/15995730687808.pdf Diakses, 10 Oktober 2021.

Kementerian Sosial. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. In Kementerian Sosial Republik Indonesia

Neuman, W. Lawrence. 2016. *Social research methods: qualitative and quantitative approaches* Edisi Ketujuh. University of Wisconsin, Whitewater: Pearson Education, Inc.

Rahmawati, Evi. 2017. Peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah. *Skripsi.* Unnes. http://lib.unnes.ac.id/29800/1/1201413087.pdf Diakses 10 Januari 2022.

Ryff, C.D. 1995. *The structure of psychological well-being revisited. Jounal of personality and social psychology*, 69 (4), 719-727.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia: Mengganggas model jaminan sosial. Bandung: Alfabeta.Suparlan, Parsudi (ed). (1984). Kemiskinan di perkotaan untuk antropologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Sinar Harapan.

Summers, J. K., Smith, L. M., Case, J. L., & Linthurst, R. A. 2012. A review of the elements of human well-being with an emphasis on the contribution of ecosystem services. *Ambio*, *41*(4), 327–340. https://doi.org/10.1007/s13280-012-0256-7

Susantyo, B., Marjuki, & Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

(Indonesia), 2018. *Optimalisasi Peran Dan Fungsi Pendamping Sosial : Studi Di Empat Kota Di Indonesia*

Syifa Aprilian. 2018. *Pengaruh optimisme (optimism) terhadap kesejahteraan subjektif (subjective well-being)pelaku wirausaha di dominion store*. Jurnal: Universitas Airlangga.https://www.researchgate.net/publication/325076793_Pengaruh_Optimisme_Optimism_Terhadap_Kesejahteraan_Subjektif_Subjective_Well-Being_Pelaku_Wirausaha_Di_Dominion_Store